



KADIN NEWS

VOL. 11 | JUNI 2024



**KADIN PAPUA
BARAT DAYA**

Kadin Indonesia Sambut Kadin Provinsi ke-35: Papua Barat Daya

ITIF 2024:
Kolaborasi Kadin Indonesia dan
Kemenparekraf RI Dorong
Pertumbuhan Pariwisata
Berkelanjutan

Perkuat Akselerasi Ekonomi
Syariah, Kadin Indonesia Gelar
Rapat Kerja Nasional Badan
Ekonomi Syariah

Perkuat Kolaborasi dengan
Komunitas Bisnis Internasional di
Indonesia, Lewat International
Chamber of Commerce Luncheon

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

01	Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia	Manfaat Keanggotaan Kadin	34
03	FGD/Seminar	Cara Pendaftaran Anggota Kadin	35
06	Program Pengurus	Fitur Terbaru Website Kadin	36
17	Kegiatan Bersama dengan Kementerian/Lembaga/Asosiasi/Media	Kabar Terkini: Penguatan Ekosistem Keamanan Siber Nasional: Menyingkap Kerangka Baru BSSN tentang Manajemen Insiden Siber dan Krisis Siber	37
22	Kunjungan Internasional	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin for Naker	49
25	Ayo Berkadin!	Inisiatif Kadin Indonesia: Wiki Wirausaha	50
28	Special Section Musyawarah Provinsi V Kadin Provinsi Papua Barat	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin Net Zero Hub	51
29	Special Section Musyawarah Provinsi I Kadin Provinsi Papua Barat Daya	Inisiatif Kadin Indonesia: TRADE	52
30	Special Section Partisipasi Aktif Kadin dalam International Tourism Investment Forum 2024		

SAMBUTAN KETUA UMUM

Kadin Indonesia



Melalui kolaborasi strategis dan inisiatif bersama, Kadin Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, mendukung penguatan kapasitas pengusaha, dan mendorong pengembangan UMKM menuju Indonesia Emas 2045.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya yang senantiasa mengiringi langkah Kadin Indonesia dalam memajukan dunia usaha di negeri ini.

Mewakili Kadin Indonesia, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan tim Sekretariat Kadin Indonesia, yang telah bekerja keras dalam merealisasikan berbagai program strategis. Pada newsletter edisi ke-11 ini, saya ingin menyampaikan beberapa program yang telah berjalan selama bulan Juni, termasuk Muprov V Kadin Provinsi Papua Barat dan Muprov I Kadin Provinsi Papua Barat Daya, dimana jumlah Kadin Daerah Provinsi telah resmi bertambah menjadi 35. Acara ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk berdiskusi menyusun strategi menghadapi berbagai tantangan ekonomi guna mendukung tercapainya target pertumbuhan di masa yang akan datang. Sekali lagi, saya ucapkan selamat mengemban tugas baru kepada Bapak Darwanto dan Ibu Suryati, sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi yang terpilih.

Selain senantiasa berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Kadin juga terus meningkatkan upaya untuk meningkatkan daya saing sektor jasa, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan Kemenparekraf RI dalam International Tourism Investment Forum (ITIF) 2024. Forum ini bertujuan mendorong investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sebuah sektor yang vital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kadin Indonesia juga terus mendukung pengembangan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi syariah di Indonesia, melalui diadakannya Rapat Kerja Nasional Badan Ekonomi Syariah. Inisiatif "Ayo Berkadin!" juga semakin diperkuat dengan suksesnya acara International Chamber of Commerce Luncheon, yang mempererat koordinasi dan komunikasi bersama komunitas bisnis internasional di Indonesia.

Saya berharap, melalui program-program tersebut, Kadin Indonesia dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, serta mendukung penguatan kapasitas pengusaha nasional dan mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.

Akhir kata, mari kita terus bekerja keras dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.

Salam,

M. Arsjad Rasjid P. M.

Ketua Umum Kadin Indonesia

Sorotan Kegiatan **Bulan Ini**



MEETING
PENGURUS BIDANG



MEETING DENGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA



AUDIENSI



EVENT



ANGGOTA BARU



ANGGOTA YANG
MEMPERPANJANG KTA



PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA



KUNJUNGAN
INTERNASIONAL

Dukungan Kadin Indonesia untuk Inovasi Konstruksi Ramah Lingkungan di Jakarta Surface Show 2024



Proyek konstruksi bangunan di Indonesia saat ini proporsinya 57% dari total nilai proyek konstruksi di tahun 2024. Tren ini membuka pasar bagi produk bahan bangunan dan bahan pelapis seperti kayu, keramik, batu, beton, plastik, karet, tekstil, dan berbagai material lainnya yang menutup permukaan bangunan seperti pada lantai, dinding, langit-langit.



Sebagai upaya menangkap kebutuhan peluang pasar di sektor desain dan arsitektur, maka Kadin Indonesia mendukung penyelenggaraan Jakarta Surface Show 2024 yang diselenggarakan 7 hingga 9 Juni 2024. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur, Insannul Kamil dan acara ini juga menyoroti tren serta pentingnya prospek bangunan dan properti yang ramah lingkungan. Dalam prosesi pembukaan, Insannul Kamil juga turut menjadi narasumber dalam seminar yang membahas pentingnya konstruksi ramah lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau.



Jakarta Surface Show 2024 didukung oleh berbagai lembaga penting termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kadin Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur, Italian Trade Agency, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI), dan Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII). Dukungan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong praktik-praktik ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

FGD/SEMINAR

Kadin Indonesia Dukung Penguatan Ekspor Produk Kecantikan Lokal



Jumlah pelaku usaha industri kosmetik Indonesia tumbuh pesat dan meningkat 21,9%, dari 913 perusahaan pada 2022 menjadi 1.010 perusahaan pada pertengahan 2023. Selama periode Januari-November 2023, ekspor produk kosmetik, wewangian, dan essential oils mencapai USD 770,8 juta.

Segmen pasar terbesar adalah perawatan diri (personal care) dengan volume pasar sebesar USD 3,18 miliar pada tahun 2022, disusul skincare sebesar USD 2,05 miliar, kosmetik USD 1,61 miliar, dan wewangian (fragrance) USD 39 juta. Potensi pasar secara nasional mencapai 467.919 produk di tahun 2024, atau meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara global diperkirakan dapat mencapai USD 473,21 miliar di tahun 2028 dengan estimasi pertumbuhan industri rata-rata 5,5% per tahun.



Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri kosmetik lokal, Kadin Indonesia turut berpartisipasi dalam Jakarta X Beauty 2024 diadakan pada 6-9 Juni 2024 di Jakarta Convention Center, oleh Female Daily, sebuah komunitas kecantikan di Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryoprato, turut mengisi dalam talkshow "Going Global; Is Your Company Ready?" pada Jumat, 7 Juni 2024. Dalam sesi talkshow tersebut, beliau membahas strategi dan peluang bagi para pelaku usaha kecantikan Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Aldi juga menekankan pentingnya branding sebagai elemen kunci dalam mendorong industri kecantikan Indonesia untuk go international, memperkuat identitas dan daya saing produk kecantikan lokal di kancah global.

(lanjutan di halaman 5)

Saat ini di tingkat global, perusahaan-perusahaan besar seperti L'Oréal, Estée Lauder, dan Shiseido mendominasi pangsa pasar dengan lebih dari 50% kapitalisasi pasar. Sementara di tingkat nasional, brand-brand lokal seperti Wardah, Mustika Ratu, Martha Tilaar, Ristra hingga brand baru seperti BLP Beauty, Rollover Reaction, ESQA mulai meningkat market share-nya. Dengan dukungan yang tepat dan strategi yang matang, industri kecantikan Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan di pasar global, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian negara, dan menempatkan brand kecantikan Indonesia di kancah internasional.

Geliat Industri Kosmetik di Indonesia

PERTUMBUHAN INDUSTRI KOSMETIK DI INDONESIA

Jumlah **pelaku industri kosmetik di Indonesia meningkat 21,9%** dari 913 perusahaan di 2022 menjadi 1.010 perusahaan pada pertengahan 2023.

EKSPOR PRODUK KOSMETIK

Nilai ekspor untuk produk kosmetik, wewangian, dan essential oils **mencapai USD770,8 juta** untuk periode Januari-November 2023.

SEGMENT PASAR PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA TAHUN 2023



Personal Care (perawatan diri)
USD3,18 miliar



Skincare
USD2,05 miliar



Kosmetik
USD1,61 miliar



Wewangian (Fragrance)
USD39 juta

POTENSI MARKET SIZE



Potensi market size nasional tahun 2023:
467.919 produk
(10x lipat dalam 5 tahun terakhir)



Potensi market size global tahun 2028:
USD473,21 miliar
(pertumbuhan rata-rata 5,5% per tahun)

Sumber: Hasilkan Produk Berdaya Saing Global, Industri Kosmetik Nasional Mampu Tembus Pasar Ekspor dan Turut Mendukung Penguatan Blue Economy, ekon.go.id, Februari 2024, (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia)



PROGRAM PENGURUS

Perkuat Akselerasi Ekonomi Syariah, Kadin Indonesia Gelar Rapat Kerja Nasional Badan Ekonomi Syariah



Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Dibuka oleh WKU Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi, Yukki N. Hanafi, serta dipimpin oleh Kepala Badan Ekonomi Syariah, Taufan E. N. Rotorasiko, Rakernas ini menjadi wadah untuk menguatkan peran Kadin dalam mendorong ekonomi syariah melalui inisiatif kolaboratif dengan sektor swasta dan lembaga internasional.

Kadin berupaya meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah dengan pelatihan untuk scale up UMKM halal serta membuka akses pembiayaan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Dalam mendukung Halal Value Chain (HVC), Kadin mendorong sinkronisasi kebijakan terkait pengembangan industri halal dan infrastruktur seperti lab halal, sertifikasi dan pelatihan halal, auditor halal, serta logistik halal. Program inkubasi dan channeling UMKM mencakup peningkatan kapabilitas akses permodalan, sertifikasi halal, teknologi, pelatihan, dan standardisasi untuk UMKM.

Kadin Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sektor keuangan syariah melalui berbagai program dan kolaborasi. Perhatian juga diberikan untuk menghubungkan sektor keuangan syariah dengan halal value chain, meningkatkan efisiensi dan manfaat ekonomi melalui integrasi dan inovasi keuangan. Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan dan pemerintah, Kadin Indonesia berharap dapat mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan inklusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.



Rapat ini juga menyepakati langkah-langkah strategis yang akan dikolaborasikan dengan berbagai pihak terkait guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri halal di Indonesia.

PROGRAM PENGURUS

Program Pelatihan Business Continuity Plan: Meningkatkan Ketangguhan UMKM dalam Menghadapi Bencana Sosial



Bencana sosial memberikan dampak negatif dalam jangka panjang, terutama bagi kegiatan usaha di sekitar area bencana. Data menunjukkan bahwa 23,1% UMKM mengalami penurunan omzet karena bencana sosial, sementara 19,5% lainnya terkendala dalam hal distribusi dan permodalan, meskipun telah ada perlindungan melalui UU Nomor 20 Tahun 2008. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meningkatkan ketangguhan sektor UMKM dalam menghadapi bencana sosial.

Menjawab kebutuhan ini, Kadin Indonesia mengadakan Program Pelatihan Business Continuity Plan (BCP) untuk UMKM pada Rabu, 5 Juni 2024. Program ini bertujuan untuk mengenalkan konsep BCP dan penerapannya di Indonesia, sehingga UMKM dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis yang tidak terduga, namun mungkin saja terjadi. Melalui pelatihan ini, diharapkan UMKM dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk melanjutkan operasional bisnis di tengah krisis.



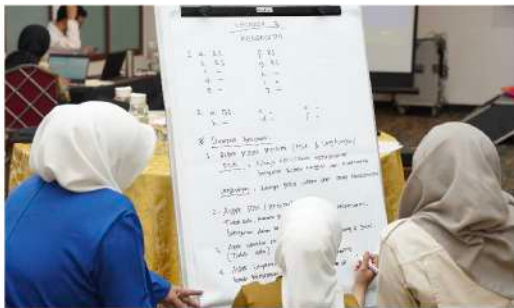
Dibuka oleh Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Suryani Motik, pelatihan BCP ini juga memberikan pengetahuan praktis kepada para pelaku UMKM tentang cara mengidentifikasi risiko, merancang strategi mitigasi, dan memastikan kelangsungan bisnis dalam situasi darurat. Dengan BCP, UMKM tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga diharapkan dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pengetahuan ini penting agar UMKM bisa terus beroperasi dan menjaga stabilitas ekonomi, meskipun dihadapkan pada situasi krisis.

PROGRAM PENGURUS

Lokakarya KUAT: Membangun Ketangguhan UMKM Perempuan dalam Menghadapi Bencana



Di Indonesia, perempuan memiliki peran dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan kinerja UMKM. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) menyampaikan, sebanyak 64 persen dari UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan.



Menyadari pentingnya peran perempuan terhadap UMKM nasional, Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Yani Motik, melaksanakan kegiatan Komunitas Perkotaan untuk Aksi Tangguh (KUAT) Batch ke-7 pada 19-20 Juni 2024. Acara ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan UMKM khususnya yang dikelola perempuan dalam merespons bencana serta merencanakan keberlanjutan usaha pascabencana.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kadin Kabupaten Bogor dan 50 peserta UMKM perempuan. Melalui berbagai sesi pelatihan dan diskusi, peserta dibekali dengan keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk mengelola risiko bencana dan memastikan keberlanjutan usaha mereka dalam situasi darurat.

Program KUAT juga melibatkan praktik langsung dan studi kasus untuk memastikan peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam konteks nyata. Fokus utama adalah membangun ketahanan usaha dan meningkatkan peran perempuan dalam sektor ekonomi, khususnya dalam menghadapi dan mengatasi tantangan yang timbul akibat bencana.

Program KUAT Batch ke-8 dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Juli dan diharapkan dapat terus memperluas jangkauan dan dampaknya, sehingga semakin banyak UMKM yang siap menghadapi bencana dan memastikan keberlangsungan usaha mereka.

PROGRAM PENGURUS

Roadmap Hilirisasi ESDM dan Perindustrian: Langkah Awal Menuju Kemandirian Energi

Pada 13 Juni 2024, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto, bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Solihin J. Kalla, menggelar rapat koordinasi daring yang dihadiri oleh jajaran pengurus Bidang ESDM dan Bidang Perindustrian Kadin Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk membahas Roadmap Hilirisasi serta persiapan Rakornas ESDM dan Perindustrian yang akan datang.

Pertemuan ini membahas tema utama yang rencananya akan diusung dalam Rakornas, yaitu penyusunan Roadmap “Hilirisasi”, dengan sub-tema yang mencakup minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, energi baru terbarukan, serta ketenagalistrikan. Roadmap ini akan menjadi panduan dalam upaya mencapai kemandirian energi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.



Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pengurus bidang adalah penyusunan kerangka awal Roadmap Hilirisasi. Roadmap ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pengembangan industri hilir di sektor ESDM dan Perindustrian, serta menghasilkan inovasi dan kolaborasi yang memperkuat daya saing nasional. Guna mewujudkan Roadmap yang inklusif dan komprehensif dan berkelanjutan, Kadin akan melibatkan berbagai pihak terkait sehingga dapat tercapai tujuan bersama.

Roadmap Hilirisasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam Indonesia secara optimal. Kadin Indonesia siap mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan visi kemandirian energi melalui inovasi dan kolaborasi di sektor ESDM.

PROGRAM PENGURUS

Indonesia Czech Business Forum: Mencapai Target Net Zero Emission melalui Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah menjadi isu yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% (13,9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik.

Menyadari pentingnya topik pengelolaan limbah, Kadin Indonesia menyelenggarakan pertemuan strategis dengan perwakilan Republik Ceko untuk membahas potensi kerja sama dalam bidang pengelolaan limbah yang dilakukan pada 12 Juni 2024. Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, serta dihadiri oleh Ketua Komite Bilateral (Kombil) Eropa Tengah, Sulaiman Saleh.



Dalam pertemuan tersebut, Kadin Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung target Net Zero Emission 2060. Shinta W. Kamdani menyatakan bahwa Kadin sedang membangun ekosistem bisnis berkelanjutan dengan melibatkan sektor swasta melalui peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, di mana keberlanjutan menjadi salah satu pilar utama. Kadin juga bekerja sama dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Republik Ceko, yang diwakili oleh Duta Besar Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Doleček, menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pengelolaan limbah. Dalam pertemuan itu, Duta Besar Ceko juga menjabarkan program daur ulang serta rencana untuk melarang penimbunan limbah yang dapat didaur ulang pada tahun 2030. Teknologi modern yang digunakan oleh Republik Ceko dalam pengelolaan limbah diharapkan dapat menjadi referensi bagi Indonesia, selain pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis bagi pelaku usaha Indonesia di sektor ini.

Sebagai bentuk tindak lanjut, forum bisnis Ceko mengundang partisipasi Indonesia dalam Indonesia Sustainability Forum 2024 dan meminta komitmen untuk kolaborasi yang baik demi mendukung pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan.



PROGRAM PENGURUS

Episode 10 Podcast 'PortCast' Tayang di Kadin Logistik Channel

Pada tanggal 13 Juni 2024, episode ke-10 dari podcast 'PortCast' dirilis di YouTube channel "Kadin Logistik Channel". Episode kali ini mengangkat topik penumpukan 26.000 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya hingga bulan Mei tahun ini. Masalah penumpukan kontainer saat ini sedang menjadi topik bahasan advokasi yang hangat.

Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Akbar Djohan, hadir sebagai pembicara utama dalam episode ini, bersama dengan Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan Kemenko Perekonomian Tatang Yuliono, Ketua ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Jakarta Adil Karim, dan Wakil Ketua Komtap Pengembangan Citra Bidang Perdagangan Kadin. Mereka membahas penerbitan Permendag nomor 8 tahun 2024 yang diterbitkan sebagai tanggapan terhadap situasi penumpukan kontainer tersebut. Diskusi ini dihadirkan dengan judul yang menarik perhatian, "Silang Sengkarut Kontainer Numpuk, Peraturan Diubah Lagi?"



Podcast ini telah menjadi platform penting bagi para pelaku logistik dan ekosistemnya dalam memahami langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah penumpukan kontainer. Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok menjelaskan latar belakang dan implementasi peraturan baru, serta dampaknya terhadap efisiensi pelabuhan dan rantai pasok nasional.

Dengan keluarnya peraturan baru ini, diharapkan penumpukan kontainer di pelabuhan dapat berkurang, sehingga memperlancar arus barang dan mendukung kegiatan ekonomi. Para narasumber juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan asosiasi terkait dalam menciptakan solusi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan logistik dan rantai pasok di Indonesia.



Bapak dan Ibu dapat menyaksikan tayangan **PortCast Episode 10** melalui scan QR berikut

Kadin Indonesia dan HSBC Bahas Kemitraan Strategis untuk Perubahan Berkelanjutan



Pada 10 Juni 2024, Kadin Indonesia dan HSBC melakukan pertemuan strategis untuk membahas topik pertumbuhan berkelanjutan. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, turut hadir serta Ketua Kadin Net Zero Hub, turut hadir pada pertemuan tersebut dan berdiskusi dengan perwakilan HSBC mengenai berbagai kebijakan keuangan dan peluang kemitraan dalam bidang keberlanjutan.

Agenda diskusi juga termasuk potensi kolaborasi HSBC untuk dengan ekosistem keberlanjutan Indonesia dan dukungan terhadap Indonesia di tingkat global. HSBC, yang terlibat dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.



PROGRAM PENGURUS

Pemetaan Rantai Pasok Modul Solar PV oleh Kadin untuk Mendukung TKDN

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan segera mengeluarkan peraturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khusus untuk modul surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS diturunkan menjadi 40%.

Menyikapi hal ini, Kelompok Kerja (Pokja) Sustainability Energi Transisi Kadin Indonesia bersama Kadin Net Zero Hub mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pemetaan produsen dan rantai pasok dari modul solar PV. Langkah advokasi kebijakan ini dilakukan guna mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses pasar bagi produsen dalam negeri di sektor Renewables Manufacturing.



Pemetaan akan dilakukan atas delapan komponen utama pembuatan modul solar PV, yaitu Tempered Glass, PV Junction Box, Backsheet, Aluminium Frame, Film Eva, PV Ribbon, Solar Cell, dan Silicon. Pembahasan akan difokuskan pada pemetaan sertifikasi dari Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Melalui pemetaan ini, Kadin Indonesia berharap dapat mendorong pemenuhan standar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri.

Agenda kebijakan di atas dibahas dalam Workshop TKDN pada Rantai Pasok PLTS yang diselenggarakan di Menara Kadin Indonesia, pada 20 Juni 2024. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para pemangku kepentingan tentang pentingnya TKDN dan bagaimana penerapannya dapat memperkuat industri lokal. Workshop ini juga menjadi forum untuk berdiskusi mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan penggunaan komponen lokal di sektor PLTS.

Kedepannya, Kadin Indonesia bermaksud untuk menyerahkan hasil pemetaan rantai pasok tersebut kepada Kementerian Perindustrian. Harapannya, masukan dari industri dapat diakomodasi dalam peraturan tersebut sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri energi terbarukan di Indonesia serta mengurangi ketergantungan pada komponen impor.



PROGRAM PENGURUS

Rapat Koordinasi Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi: Mendorong Ekonomi Nasional



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto, mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Wakil Ketua Umum sebagai persiapan Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia. Pertemuan ini membahas berbagai arahan strategis termasuk penyusunan narasi tunggal dan peta jalan dari setiap Bidang/Badan Kadin Indonesia sebagai masukan untuk pemerintahan baru yang akan datang.

Dalam pertemuan tersebut, Carmelita Hartoto menekankan pentingnya sinergi antar bidang dan badan di bawah Kadin guna menciptakan kebijakan yang koheren dan komprehensif. Narasi tunggal yang akan disusun bertujuan untuk memberikan panduan jelas dan terfokus tentang prioritas Kadin dalam mendukung pembangunan nasional. Peta jalan dari setiap bidang juga diharapkan akan membantu perumusan langkah-langkah konkret guna mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.



Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Denon Prawiraatmadja (Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan), Solihin Kalla (Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral), Charles Honoris (Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan), Suryani Motik (Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana), Tri Hanurita (Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan), Irawadi Hanafi (Wakil Ketua Umum Bidang Industri Olahraga), Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok serta Kepala Badan Riset dan Teknologi yang baru diperkenalkan sebagai bagian dari lingkup Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi.

Sebagai langkah lanjutan, masing-masing bidang dan badan akan menyusun narasi tunggal dan roadmap mereka dalam waktu beberapa bulan kedepan. Output kerja ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan baru, membantu dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas manusia, serta inovasi teknologi di Indonesia.

PROGRAM PENGURUS

Inisiatif FGD Bidang Kominfo Bahas Dewan Sosial Media dan Keamanan Siber

Mengutip data dari laporan We Are Social: Data Digital Indonesia 2024, total populasi Indonesia kini telah mencapai 276,4 juta dengan pengguna internet sebanyak 212,9 juta (77% dari total populasi) dan pengguna media sosial aktif mencapai 167 juta (60,4% dari total populasi). Tingginya angka ini menunjukkan pentingnya ada regulasi yang tepat dalam penggunaan media sosial untuk menangani berbagai isu seperti, penyebaran hoaks, ujaran kebencian hingga pelanggaran privasi.

Dalam rangka merespon tantangan ini, Kadin Indonesia melalui Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie H. Ganinduto, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 25 Juni 2024 di Menara Kadin Indonesia. Acara ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait dampak wacana pembentukan Dewan Sosial Media oleh pemerintah.

FGD ini turut dihadiri oleh pengurus Kadin dan para narasumber yang berkompetensi terkait topik kebutuhan Dewan Media Sosial dalam mengurangi dampak negatif dunia media sosial, serta pentingnya tata kelola yang transparan untuk menjaga kebebasan berekspresi. Dewan Media Sosial diharapkan dapat menjadi solusi dalam menangani berbagai isu di platform media sosial yang dapat merugikan perusahaan, seperti serangan reputasi melalui penyebaran informasi palsu. Firlie H. Ganinduto menekankan bahwa rekomendasi yang disusun akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk menciptakan regulasi yang adil dan efektif.



PROGRAM PENGURUS

Membangun Keamanan Siber yang Kuat

Keamanan siber telah menjadi prioritas utama bagi berbagai organisasi di seluruh dunia, khususnya dunia usaha dan industri. Laporan terbaru dari Cybersecurity Ventures memperkirakan kerugian akibat kejahatan siber secara global akan mencapai USD10,5 triliun per tahun pada 2025. Di Indonesia sendiri, ancaman siber juga semakin meningkat seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Menurut laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp24,9 triliun pada tahun 2021 akibat kejahatan siber.



Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Firlie H. Ganinduto, menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 28 Juni 2024 di Menara Kadin Indonesia. FGD ini bertujuan untuk mempersiapkan blueprint pengembangan industri dan ekosistem keamanan siber, yang merupakan inisiatif bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta US-ASEAN Business Council (US-ABC).

Melalui diskusi ini, telah dikumpulkan informasi dan pandangan dari berbagai sektor, seperti; keuangan, fintech, manufaktur, konstruksi, dan kesehatan. Keamanan siber merupakan kunci untuk memastikan stabilitas ekonomi digital dan melindungi aset-aset perusahaan. Rangkuman hasil FGD ini akan menjadi bahan referensi penyusunan blueprint pengembangan ekosistem keamanan siber.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN ASOSIASI

Kolaborasi Kadin Indonesia & APJI dalam Meningkatkan Kualitas dan Ekonomi Jasa Boga



Pada tanggal 27 Juni 2024, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, bersama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi, Yukki N. Hanafi, turut hadir dan memberikan kata sambutan dalam acara pelantikan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI). Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Wisnu W. Pettalolo, Kepala Bidang Logistik dan Rantai Pasok Akbar Djohan, serta Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Adi Mahfudz.



Sektor jasa boga memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi nasional. Mewakili Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Yukki berharap APJI dapat terus memperkuat perannya, mendukung UMKM jasa boga untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat perekonomian nasional.



Acara ini juga menandai pelantikan Tashya Megananda Yukki sebagai Ketua Umum DPP APJI untuk masa bakti 2024-2029. Sebagai gambaran informasi, APJI berdiri sejak 17 Oktober 1984 di Jakarta memiliki nama awal Asosiasi Catering Seluruh Indonesia (ACSI). Kemudian asosiasi yang beranggotakan sekitar 3.500 anggota di seluruh Indonesia ini mengalami beberapa perubahan nama hingga menjadi Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil Lahadalia juga menyampaikan dukungannya terhadap program pemerintah terpilih mendatang yang berfokus pada peningkatan gizi dan pengentasan stunting. Melalui sinergi dan kolaborasi dengan APJI, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif, mengingat pentingnya sektor jasa boga dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Mendorong Peran Aktif Asosiasi Transportasi dalam Pengembangan Proyek Strategis Nasional

Kadin Indonesia terus mendorong peran aktif dari berbagai asosiasi, termasuk di sektor transportasi. Hal ini tercermin dari audiensi yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan, Denon Prawiraatmadja, dengan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) pada Senin, 3 Juni 2024. Pertemuan ini membahas berbagai hal strategis, salah satunya adalah keterlibatan Kadin Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ABUPI yang akan diselenggarakan pada 6 Juni 2024.

Dalam audiensi ini, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan mengusulkan agar hasil Rakernas ABUPI dijadikan bahan masukan bagi pemerintah baru. Dengan memberikan masukan yang konstruktif, diharapkan dapat memperkuat peran transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam pengembangan proyek strategis nasional di berbagai destinasi wisata.



Selain itu, rencana untuk mengadakan rapat gabungan khusus juga menjadi agenda penting dalam pertemuan ini. Agenda rapat meliputi rencana bisnis strategis untuk sektor transportasi darat, laut, dan udara. Hasil rapat gabungan diharapkan dapat menghasilkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan proyek strategis nasional, terutama di kawasan pariwisata yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Melalui audiensi dengan ABUPI, Kadin Indonesia menunjukkan komitmen dalam mendorong peran aktif asosiasi transportasi dalam pengembangan proyek strategis nasional. Dengan masukan yang tepat dan kolaborasi yang erat, sektor transportasi diharapkan dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan pariwisata di Tanah Air.

Kunjungan Kadin Indonesia ke Kompas Gramedia: Diskusi Inisiatif dan Kebijakan untuk Indonesia



Kadin Indonesia mengadakan kunjungan ke Kompas Gramedia, salah satu grup media terbesar di Indonesia pada 20 Juni 2024. Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Yukki. N Hanafi, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K. Harjono dan Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Herman Heru Suprobo. Kunjungan ini merupakan bagian dari inisiatif Kadin Indonesia untuk meningkatkan hubungan silaturahmi dengan media, sekaligus membahas berbagai agenda dan isu penting terkait kebijakan ekonomi untuk Indonesia.



Kadin Indonesia juga menyoroti berbagai inisiatif yang telah dilakukan dan sejalan dengan empat pilar utama Kadin. Salah satunya adalah penguatan Lembaga Mediasi dan Sengketa Bisnis sebagai salah satu alternatif solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis di tanah air. Lembaga ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi para pelaku bisnis.

Selain itu, isu gizi dan nutrisi untuk generasi mendatang juga menjadi perhatian penting dalam diskusi ini. Kadin Indonesia menyadari bahwa sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas adalah kunci keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, Kadin mengusulkan berbagai program seperti pencegahan stunting dan peningkatan nutrisi yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi dan nutrisi bagi anak-anak Indonesia.

Diskusi juga mencakup masukan penting bagi Whitepaper kebijakan ekonomi program kerja pemerintah 2024-2029. Whitepaper yang sedang disiapkan Kadin Indonesia berisi usulan dan masukan di bidang ekonomi yang nantinya disampaikan ke pemerintah dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan pembangunan ekonomi jangka menengah.

Kunjungan ini diharapkan dapat menunjukkan komitmen dan memperkuat posisi Kadin Indonesia sebagai organisasi induk dunia usaha, sekaligus sebagai mitra strategis pemerintah dalam membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan global ke depan.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Persiapan Rakorwil Kalimantan dan Borneo Economic Forum oleh Kadin dan Pemprov Kalimantan Selatan

Sebagai bentuk dari tindak lanjut surat yang disampaikan oleh Kadin Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan pertemuan dan penting guna membahas agenda persiapan Rakorwil Kalimantan dan Borneo Economic Forum, di Kantor Setda Kalimantan Selatan, pada 20 Juni 2024. Pertemuan ini bertujuan memenuhi undangan dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengundang Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi dan Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan, Feri Rizal.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan dan Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan memaparkan Kerangka Acuan Kerja serta progres persiapan Rakorwil Kalimantan dan Borneo Economic Forum.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan penuh terhadap rencana yang disampaikan Kadin dan menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan acara. Dukungan ini menunjukkan pentingnya forum ini bagi pemerintah daerah. Borneo Economic Forum (BEF) adalah acara tahunan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Borneo, mencakup Indonesia (Kalimantan), Malaysia (Sabah dan Sarawak), dan Brunei Darussalam. Forum ini diharapkan menjadi platform bagi pemangku kepentingan untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan merumuskan strategi bersama dalam rangka mengatasi tantangan ekonomi dan memanfaatkan peluang di kawasan Borneo.

Rakorwil Kalimantan dan Borneo Economic Forum rencananya akan dilaksanakan pada 12-13 Agustus 2024 di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin. Melalui dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kolaborasi antara Kadin, diharapkan acara ini dapat membawa manfaat jangka panjang bagi kawasan ini.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Optimalisasi Angkatan Kerja dalam Pemanfaatan Bonus Demografi



Indonesia saat ini masih berada dalam periode bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), puncak bonus demografi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030, dengan angkatan kerja mencapai sekitar 70 persen dari total populasi. Kondisi ini memberikan kesempatan emas bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial.

Dalam rangka memaksimalkan potensi bonus demografi, seluruh pihak perlu memastikan bahwa angkatan kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Data BPS menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk bekerja dalam negeri didominasi oleh lulusan SD ke bawah. Jumlahnya mencapai 51,49 juta orang atau menyumbang 36,82% dari total penduduk bekerja di Tanah Air. Guna mengatasi masalah ini, berbagai program telah dikembangkan oleh pemerintah, termasuk Program Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan dan insentif kepada para pencari kerja dan pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19.

Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri dalam mengoptimalkan angkatan kerja juga perlu menjadi fokus utama. Dalam Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan oleh Lemhanas RI pada 25 Juni lalu, Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz, beserta Ketua Komtap Kerjasama Kementerian/Lembaga dan Industri membahas strategi untuk memanfaatkan bonus demografi. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan sertifikasi profesi agar lulusan siap kerja dan dapat bersaing di pasar global.

Meskipun Indonesia masih mengalami bonus demografi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial, tetap diperlukan upaya yang sinergis dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang ada. Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri, menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Peluang Baru Indonesia-Uruguay di Sektor Komoditas Daging dan Susu

Pada Senin, 3 Juni 2024, Kadin Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Oriental Uruguay untuk Republik Indonesia, mengadakan pertemuan bisnis bertema "Uruguay - Indonesia for Meat and Dairy Products." Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dagang antara kedua negara, terutama pada komoditas daging dan susu.

Naiknya permintaan susu dalam negeri yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan impor menjadikan Uruguay muncul sebagai mitra potensial yang strategis. Uruguay memiliki kemampuan produksi susu yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 2,29 juta ton pada tahun 2022, dengan 70% dari jumlah tersebut diekspor ke lebih dari 60 negara.



Selain susu, potensi daging Indonesia dan Uruguay juga dapat ditemukan pada produk daging. Diperkirakan, pada tahun 2024 Uruguay dapat mengekspor daging sapi sebanyak 467.000 ton pada tahun 2024. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengamankan pasokan daging sapi berkualitas. Saat ini, Indonesia masih banyak bergantung pada impor daging sapi dari negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru. Melalui akses pasar baru seperti Uruguay, Indonesia dapat memperluas sumber pasokan.



Pertemuan bisnis antara Kadin Indonesia dan Kedutaan Besar Uruguay menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan dagang. Dengan potensi besar di sektor daging dan susu, kerjasama ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan Indonesia secara lebih efisien dan berkelanjutan, serta membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.



KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia Sambut Kunjungan French Trade Advisory Council



Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, didampingi oleh Komtap Eropa dan Komite Bilateral Perancis, menerima kunjungan French Trade Advisory Council di Menara Kadin Indonesia pada 20 Juni 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh 17 CEO perusahaan Prancis yang ada di Indonesia dan bertujuan untuk membahas berbagai aspek penting dari tren ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan baru yang akan datang.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa topik utama termasuk target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%, upaya untuk mencapai swasembada pangan dan energi, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis. Selain itu, pengembangan industri hilir (downstream), pengentasan kemiskinan, dan optimalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia juga menjadi agenda utama diskusi.



Ketua Umum Kadin Indonesia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak perusahaan-perusahaan Perancis bergabung menjadi anggota Kadin. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis yang telah terjalin sejak tahun 1950, serta membuka peluang bisnis baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Kunjungan ini menandai langkah penting dalam memperkuat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Perancis, serta menunjukkan komitmen Kadin Indonesia untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Sinergi Kadin Indonesia dengan USDEC dalam Program Peningkatan Nutrisi Bergizi di Indonesia

Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor produk susu dalam memenuhi kebutuhan domestik. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan, industri pengolahan susu di dalam negeri masih mengandalkan pasokan bahan baku impor sampai 80%. Negara-negara asal impor utama antara lain adalah Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk meningkatkan kerjasama antara produsen susu Amerika dan pelaku industri di Indonesia, baik untuk memastikan pasokan yang stabil maupun untuk meningkatkan kualitas produk susu yang beredar di pasar domestik.

Merespon hal ini, pada 24 Juni, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, menerima kunjungan dari Dewan Ekspor Produk Susu Amerika Serikat (US Dairy Export Council, USDEC) di Menara Kadin Indonesia. USDEC merupakan organisasi keanggotaan nirlaba yang didedikasikan untuk meningkatkan permintaan produk susu Amerika Serikat melalui perluasan pasar pasar global dan peningkatan ekspor.



Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia dan delegasi USDEC membahas berbagai inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk susu. Salah satu program yang dibahas adalah inisiatif peningkatan nutrisi melalui penyediaan produk susu berkualitas tinggi. Hal ini sangat relevan mengingat data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6% di 2022. Dengan meningkatkan konsumsi produk susu yang kaya akan kalsium dan protein, diharapkan dapat membantu mengurangi angka stunting di Indonesia.

Pertemuan antara Kadin Indonesia dan USDEC merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan memanfaatkan peluang ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu lokal, sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat yang semakin meningkat. Kerjasama ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor susu di masa depan, dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.





Pelatihan Perencanaan Bisnis dalam Program #Business101 UMKM Naik Kelas

Pada 26 Juni 2024 Kepala Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi menjadi narasumber utama dalam sesi pelatihan daring, yang merupakan bagian dari program "#Business101 UMKM Naik Kelas," dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi UMKM agar dapat berkembang dan berdaya saing tinggi di pasar nasional dan internasional.



Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM menyumbang 61% dari PDB Indonesia dan menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Tercatat ada sekitar 67 juta pelaku usaha di sektor UMKM. Kontribusi UMKM, terutama usaha mikro, terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor riil sangat signifikan, hampir menyamai kontribusi dari perusahaan besar.



Sesi pelatihan kali ini dihadiri oleh sekitar 300 pelaku UMKM dari berbagai sektor. Dalam sesi ini, para peserta diberikan materi mengenai pentingnya perencanaan bisnis yang matang, mulai dari analisis pasar, menentukan target konsumen, strategi pemasaran, hingga pengelolaan operasional. Kepala Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi menjelaskan bahwa perencanaan bisnis yang baik merupakan pondasi utama dalam menjalankan usaha yang sukses dan berkelanjutan.

Sebagai langkah lanjutan, pelatihan "Pembuatan Laporan Keuangan" akan diselenggarakan pada 3 Juli 2024. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam memahami dan mengimplementasikan laporan keuangan yang akurat dan transparan, sehingga dapat meningkatkan akses pembiayaan.

Program #Business 101 UMKM Naik Kelas: Menyongsong Perekonomian yang Lebih Kuat

Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023 mencatat, kontribusi UMKM mencapai 61% PDB Indonesia, dengan serapan tenaga kerja 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Jumlah pelaku usaha sektor UMKM tercatat 67 juta. Jika dilihat, kontribusi usaha mikro di Indonesia sangat pesat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor riil yang bahkan hampir menyaingi kontribusi dari perusahaan besar.

Bagian dari implementasi empat pilar utama khususnya peningkatan kapasitas usaha pelaku UMKM, Kadin Indonesia mengadakan program “#Business 101 UMKM Naik Kelas” yang sesi pertamanya telah resmi diselenggarakan pada 8 Juni 2024 secara hybrid. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Indonesia, serta mendorong mereka untuk naik kelas sehingga bisa kontribusinya lebih signifikan terhadap perekonomian nasional.

Turut hadir membuka acara ini Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, yang menekankan pentingnya peran UMKM bagi perekonomian bangsa serta semangat gotong royong dalam peningkatan perekonomian. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Yukki N. Hanafi, serta Kepala Program Studi Manajemen Pajak Universitas BSI, turut hadir memberikan sambutan inspiratif. Sesi perdana ini berfokus pada topik krusial yaitu Pembiayaan dan Permodalan UMKM. Diskusi ini dipandu oleh narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Kepala Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi serta Group Head SME Bank BSI.

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh 30 orang perwakilan komunitas UMKM asal Bekasi dan secara daring oleh 700 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Program ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan strategi praktis bagi para peserta dalam mengakses pembiayaan dan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

Setelah sukses dengan sesi perdana, kelas selanjutnya dari program #Business 101 UMKM Naik Kelas telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 dengan tema “Business Plan”. Kelas ini membahas pentingnya perencanaan bisnis yang matang sebagai fondasi bagi keberhasilan usaha. Para peserta diberikan panduan dan alat yang diperlukan untuk menyusun rencana bisnis yang efektif, termasuk analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Kadin Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung UMKM melalui berbagai program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan, sehingga UMKM Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan.





International Chamber of Commerce Luncheon: Upaya Mempererat Kolaborasi Pelaku Usaha di Indonesia



Pada 19 Juni 2024 bertempat di Menara Kadin Indonesia, acara International Chamber of Commerce Luncheon telah sukses digelar. Acara ini dihadiri oleh 50 perwakilan dari kamar dagang berbagai negara sahabat, seperti AS, Uni Eropa, Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea dan lain-lain. Turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, beserta Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Firlie. H. Ganinduto, dan Kepala Badan Riset dan Teknologi Ilham Habibie. Selain untuk mempererat hubungan, acara ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dan kegiatan terbaru dari Kadin.



Acara ini juga memperkenalkan sejumlah inisiatif penting yang sedang dikerjakan Kadin, termasuk program untuk keamanan siber dan whitepaper kebijakan ekonomi. Kegiatan ini juga digunakan untuk memperkenalkan dan mengajak anggota International Chamber untuk bergabung melalui program "Ayo Berkadin!". Inisiatif ini merupakan salah satu strategi Kadin Indonesia untuk meningkatkan jumlah partisipasi dan keterlibatan anggota, sekaligus memperluas jaringan bisnis internasional.





SPECIAL SECTION: MUSYAWARAH PROVINSI V
KADIN PROVINSI PAPUA BARAT

Muprov V Kadin Provinsi Papua Barat: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan



Musyawarah provinsi yang secara rutin diselenggarakan oleh Kadin Daerah menjadi merupakan agenda yang penting, mengingat kegiatan ini dapat menjadi forum diskusi guna membahas evaluasi kinerja organisasi selama setahun belakangan dan merumuskan program kerja mendatang, tentunya dengan terus menyesuaikan tantangan di masa depan.

Untuk itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, dan Wakil Ketua Umum Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Amir Hamzah, menghadiri Musyawarah Provinsi (Muprov) V Kadin Provinsi Papua Barat. Muprov yang diadakan pada 26 Juni 2024 bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari ini, mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Kolaboratif dan Berkelanjutan”. Acara ini berfokus pada pentingnya kerjasama untuk mendorong ekonomi Papua Barat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Arsjad Rasjid menekankan pentingnya Muprov sebagai momentum untuk menyusun strategi menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan masa depan. Ia menegaskan peran strategis Kadin sebagai penghubung antara dunia usaha, asosiasi, serta himpunan dengan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ketua Umum Kadin Indonesia berharap Kadin Papua Barat dapat menjadi katalis dalam akselerasi perekonomian Papua Barat, meningkatkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

Acara ini juga sekaligus menandai terpilihnya Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Barat, Suryati, pada periode 2024-2029 secara aklamasi. Kepemimpinan Suryati diharapkan dapat membawa energi baru untuk menggerakkan geliat ekonomi Papua Barat, serta memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di Papua Barat.

Dengan tema dan semangat yang diusung pada Muprov V ini, Kadin Indonesia bersama Kadin Provinsi Papua Barat optimis bahwa Papua Barat akan menjadi contoh sukses dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Indonesia.



SPECIAL SECTION: MUSYAWARAH PROVINSI I
KADIN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Muprov I Kadin Provinsi Papua Barat Daya: Fondasi Baru untuk Akselerasi Pembangunan Ekonomi Papua Barat Daya

Pada tanggal 27 Juni 2024, Kadin Provinsi Papua Barat Daya sukses menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) I yang diadakan di Hotel Aston Sorong. Muprov ini digelar untuk pertama kalinya sebagai wilayah baru keterwakilan dunia usaha di Provinsi Papua Barat Daya. Turut hadir dalam acara penting ini termasuk Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, serta Wakil Ketua Umum Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Amir Hamzah.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menekankan tiga fokus utama dalam mengembangkan Papua Barat Daya. Pertama, penguatan sektor pariwisata lokal, terutama Raja Ampat, yang dikenal sebagai segitiga terumbu karang terbaik di dunia. Kedua, pengembangan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Ketiga, mendorong investasi dan hilirisasi sektor pertanian dan kelautan yang memiliki potensi besar di wilayah ini. Kadin Papua Barat Daya berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong investasi, mempromosikan produk unggulan, mendukung kebijakan iklim usaha kondusif, dan melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan ekonomi.

Turut menjadi agenda utama Muprov ini adalah pembentukan kepengurusan Kadin Provinsi Papua Barat Daya yang definitif. Melalui pemilihan yang berlangsung transparan dan demokratis, Bapak Darwanto telah terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029. Terpilihnya Bapak Darwanto diharapkan dapat membawa semangat baru dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah ini.

Pjs. Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Barat, Michael Wattimena, mengapresiasi Kadin Papua Barat Daya yang telah sukses menggelar Muprov perdana bertema "Penguatan Internalisasi Kadin Dalam Mengakselerasi Pembangunan Ekonomi Papua Barat Daya Secara Optimal". Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi yang kuat antara Kadin Pusat dan Daerah, pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan, guna memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat dan pertumbuhan ekonomi provinsi ini.





ITIF 2024: Kolaborasi Kadin Indonesia dan Kemenparekraf RI Dorong Pertumbuhan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan bahwa pada triwulan III-2023 nilai devisa pariwisata mencapai lebih dari USD 6 miliar dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata sebesar 3,76 persen dengan jumlah penyerapan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai lebih dari 45 juta. Destinasi prioritas seperti Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo terus menarik minat investor, dengan kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai miliaran dolar untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang berkelanjutan.



Sejalan dengan momentum pertumbuhan tersebut, Kadin Indonesia bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi menggelar International Tourism Investment Forum (ITIF) 2024 dengan tema "Elevating Tourism Investment for Sustainable Growth." Acara ini dibuka pada tanggal 5 Juni 2024 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S. Uno, serta Menteri Keuangan, Sri Mulyani. ITIF 2024 bertujuan mendorong investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sebuah sektor yang vital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Parekraf Sandiaga S. Uno menyebutkan International Tourism Investment Forum (ITIF) 2024 berhasil menghasilkan lima penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), dengan total nilai investasi sebesar Rp 862 miliar.

(lanjutan di halaman 31)



Pada sesi konferensi pers ITIF 2024, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, menyampaikan bahwa ESG sudah menjadi pakem dalam memulai suatu bisnis saat ini, tidak terkecuali dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dirinya menyampaikan bahwa akan terus mendorong perusahaan Indonesia di berbagai sektor dan skala, untuk mengetahui tentang standar ESG ini.

“Kami selaku wadah dunia usaha, juga telah membuat sebuah panduan bagi perusahaan, apapun skalanya dari besar hingga UMKM, untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ESG. Kami akan menunjukkan langkah-langkah yang perlu diambil dan akhirnya bagaimana perusahaan bisa mulai untuk menjalankan konsep ESG ini dalam bisnis mereka,” ujar Shinta.

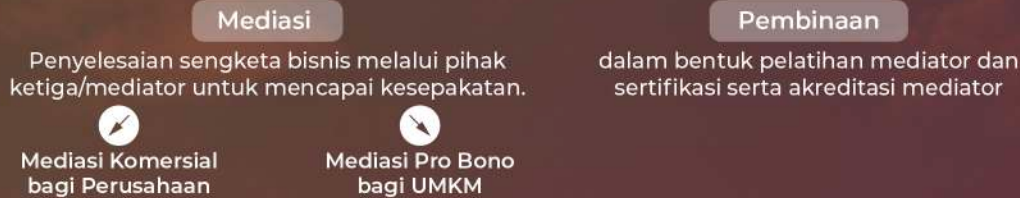
Selain itu, Shinta juga turut hadir dalam rangkaian talkshow yang diadakan selama ITIF 2024 dengan tema "Navigating Global Dynamics: Strategic Pathways to Tourism Investment and Sustainability." Sesi ini membahas strategi investasi pariwisata di tengah dinamika global. Selain itu, dialog bisnis dengan Kadin Indonesia juga dilaksanakan untuk mendiskusikan pengembangan pariwisata melalui ekonomi kreatif.

Melalui penyelenggaraan ITIF 2024, Kadin Indonesia berharap dapat meningkatkan kesadaran dan minat investor terhadap potensi besar sektor pariwisata di Indonesia. Forum ini juga diharapkan dapat terjadi sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan investor untuk menciptakan investasi yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia



Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia adalah fasilitas hukum organisasi yang memberikan manfaat bagi anggota Kadin dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Beberapa Jenis Layanan yang diberikan oleh Kadin Indonesia



Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia



Cara Mendapatkan Layanan



Untuk Informasi Lanjutan
Silahkan Hubungi:

Hotline Kadin Indonesia

+62-811-9631-0204



**Urgensi untuk melakukan
pengkinian data bagi pengurus
Kadin Indonesia**

Silakan cek **WhatsApp Hotline
(0895-6113-40500)** atau **Email** Bapak/Ibu
Pengurus, Segera Akses Link untuk Lakukan
Pengkinian Data

MANFAAT

Keanggotaan **Kadin**

Nikmati ragam keuntungan dan manfaat dengan menjadi bagian dari **keanggotaan Kadin Indonesia**



Update terhadap
Perkembangan Ekonomi
dan **Bisnis**



Dukungan dalam
Penerapan **Net Zero**



Dukungan **Advokasi**



Kemudahan **Pembuatan**
Surat Keterangan



Scaling up skill/
Kemampuan Wirausaha
dan Pekerja



Akses terhadap **Market**



Tumbuhkan Bisnis melalui
Network dan **Kolaborasi**



Dukungan terhadap
Transformasi Digital



Kesempatan **Promosi**



Potongan Harga Menarik
dari Mitra-Mitra Kadin



Terlibat dalam
Penyusunan Kebijakan
Industrial

CARA PENDAFTARAN Anggota Kadin



Scan QR Code atau
kunjugi **anggota.kadin.id**

1



Klik **"Daftar Anggota"**, lalu pilih jenis keanggotaan

2



Membuat akun dengan mendaftarkan **email** dan **NIK**

3



Menerima notifikasi pendaftaran akun dari **info.anggota@kadin.id**

4



Masuk dengan akun yang didaftarkan

5



Lengkapi formulir dengan data yang diperlukan

Persyaratan yang dibutuhkan:

- ✓ Email Penanggung Jawab
- ✓ NIB Perusahaan
- ✓ AKTA Perusahaan
- ✓ NPWP Perusahaan
- ✓ KTP Direksi
- ✓ Foto Pass Direksi
- ✓ No HP Penanggung Jawab

6



Menerima notifikasi dan unduh invoice pembayaran

7



Melakukan pembayaran ke rekening/ virtual account yang tertera di invoice

8



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**

9



Download **KTA-B**, Anda telah resmi menjadi anggota Kadin

CARA MEMPERPANJANG KEANGGOTAAN KADIN

Hotline Keanggotaan
0813 8862 8081 | 0813 9830 2790



Kunjugi **anggota.kadin.id**



Masukan Email dan kata sandi, lalu klik **"Masuk"**



Klik menu **"KTA"**, lalu klik menu **"Perpanjang KTA"**



Menerima notifikasi perpanjangan keanggotaan dan invoice dari **info.anggota@kadin.id**



Melakukan pembayaran ke rekening/virtual account yang tertera di invoice



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



Download **KTA-B**, Anda telah memperpanjang keanggotaan Kadin

FITUR TERBARU

Website **Kadin.id**



Forum Anggota Kadin

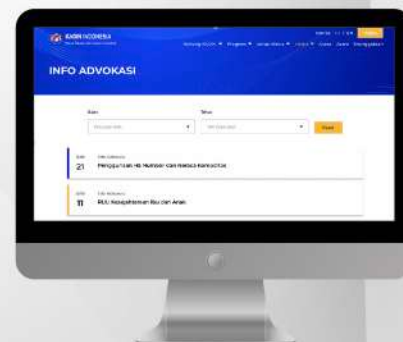
Dibuat sebagai tempat **berbagi informasi** seputar bisnis, *networking*, dan diskusi interaktif seputar perkembangan dunia usaha. Forum Anggota Kadin dikelola oleh Sekretariat Kadin Indonesia sebagai administrator.

Layanan Kadin



Halaman-halaman yang menonjolkan **layanan sekretariat** dan **manfaat keanggotaan**

Info Advokasi Kadin



Tempat untuk menghimpun informasi mengenai **perkembangan advokasi terkini** yang dilakukan oleh Kadin

KABAR TERKINI

Penguatan Ekosistem Keamanan Siber Nasional: Menyingkap Kerangka Baru BSSN tentang Manajemen Insiden Siber dan Krisis Siber

Sumber: Hukumonline.com

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, ekosistem digital Indonesia, yang beroperasi di seluruh sektor perekonomian nasional, terbukti rentan terhadap insiden siber. Dalam hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara ("BSSN") menegaskan bahwa Indonesia mengalami 976,429,996 serangan siber dan 1,65 miliar anomali trafik keamanan siber pada periode 2021 - 2022.^[1] Dari berbagai inisiatif awal pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi tantangan ini, BSSN sebelumnya menerbitkan Peraturan No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik ("PerBSSN 8/2020"), yang secara umum mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik ("PSE") mengenai pemeliharaan keamanan informasi elektronik melalui implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ("SMKI"). Perlu dicatat bahwa berbagai mandat PSE terkait SMKI dibahas secara mendalam dalam Indonesian Law Digest ("ILD") edisi berikut: "Sistem Manajemen Keamanan Informasi: Standar PSE dalam Pencegahan dan Penanggulangan Insiden Siber dengan Memenuhi ISO/IEC 27001".

Kabar baiknya, National Cyber Security Index ("NCSI") 2023 mengungkapkan bahwa keseluruhan keamanan siber Indonesia meningkat dengan skor 63,64 dari 100, yang merupakan peningkatan signifikan sebanyak 24,68 poin, dibandingkan angka pada tahun 2022 yaitu 38,96 poin. Progres ini mendorong peringkat global Indonesia menjadi ke-49 dari 176 negara, yang juga menandai peningkatan substansial dibandingkan peringkat pada tahun 2022 yaitu 83.^[2] Peningkatan ini juga ditegaskan oleh BSSN, yang mencatat Indonesia mengalami 279,84 juta serangan siber pada tahun lalu, yang menunjukkan pengurangan sebanyak 24,4% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 370,02 juta serangan siber.^[3] Namun, gelombang tantangan baru diprediksi terjadi pada tahun 2024 melihat semakin gencarnya serangan siber terkait ransomware yang lebih canggih. Terutama advanced persistent threat (APT) yang diekspektasikan akan terfokus pada sektor-sektor kritis perekonomian.^[4]

Dibangun dari momentum tersebut, pada tahun 2022, pemerintah memperkenalkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 ("Perpres 82/2022") tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital ("IIV"), yang mencakup area yang berkaitan dengan ruang lingkup, identifikasi dan pelindungan IIV.^[5] Selain itu, pada tahun berikutnya, pemerintah memperkenalkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Keamanan Siber ("Perpres 47/2023"), yang saat ini menjadi acuan penggunaan oleh lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan berkaitan dengan upaya membentuk stabilitas keamanan siber saat tahapan sebelum krisis siber, saat terjadi krisis siber, dan setelah krisis siber.^[6]

(lanjutan di halaman 38)

[1] CNN Indonesia, "BSSN: Hampir 1 Miliar Serangan Siber Hantam RI di 2022", sebagaimana diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230119144028-192-902537/bssn-hampir-1-miliar-serangan-siber-hantam-ri-di-2022> pada 28 Maret 2024. [2] Dewan Teknologi dan Informasi Nasional, "Keamanan Siber Indonesia, Ke 48 Dunia dan 8 ASEAN", sebagaimana diakses melalui <http://www.wantiknas.go.id/berita/keamanan-siber-indonesia-ke-48-dunia-dan-4-asean> pada 4 Maret 2024. [3] Otoritas Jasa Keuangan, "Strategi Mencegah Serangan Siber", sebagaimana diakses melalui https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4021/strategi-mencegah-serangan-siber#_ftn2 pada 4 Maret 2024; DataIndonesia.id, "Data Jumlah Serangan Siber ke Indonesia hingga 2023", sebagaimana diakses melalui <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-serangan-siber-ke-indonesia-hingga-2023> pada 4 Maret 2024. [4] Radio Republik Indonesia, "[Kaleidoskop] Keamanan Siber 2023 dan Prakiraan Ancaman Siber 2024", sebagaimana diakses melalui <https://www.rri.co.id/ipitek/499722/kaleidoskop-keamanan-siber-2023-dan-prakiraan-ancaman-siber-2024> pada 5 Maret 2024. [5] Untuk informasi lebih lanjut mengenai Perpres 82/2022, lihat Indonesian Legal Brief ("ILB") No. 4397. [6] Untuk informasi lebih lanjut mengenai Perpres 47/2023, lihat ILB No. 4672.

Mengikuti pemberlakuan Perpres 82/2022 dan Perpres 47/2023, BSSN memutuskan untuk memperkenalkan dua kerangka pelaksana yang telah berlaku sejak 18 Januari 2024 dan yang secara spesifik mengatur penanganan dan pelaporan insiden siber, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (“TTIS”) dan manajemen krisis siber, sebagai berikut:^[7]

1. Peraturan BSSN No.1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (“PerBSSN 1/2024”);
dan
2. Peraturan BSSN No. 2 Tahun 2024 tentang Manajemen Krisis Siber (“PerBSSN 2/2024”).

Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami terlebih dahulu berbagai istilah dan terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan berbagai aspek keamanan siber, yang diringkas pada tabel berikut:

Istilah Keamanan Siber	Arti
Keamanan siber ^[8]	Upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan serangan siber, baik bersifat teknis maupun sosial.
Peristiwa siber ^[9]	Kejadian pada sistem elektronik yang dapat diobservasi dan dapat memberikan indikasi terhadap terjadinya insiden siber.
Insiden siber ^[10]	Satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik.
Krisis siber ^[11]	Situasi kedaruratan akibat dari insiden siber pada tingkat nasional yang berdampak terhadap keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, ILD edisi kali ini menyoroti aspek utama yang baru diperkenalkan mengenai manajemen insiden siber dan krisis siber, sebagaimana diatur dalam kerangka PerBSSN 1/2024 dan PerBSSN 2/2024. Diskusi kami terbagi menjadi bagian-bagian berikut

1. Manajemen Insiden Siber

A. TTIS

B. Pelaporan Insiden Siber

C. Pelaksanaan Kesiapan terhadap Insiden Siber
2. Manajemen Insiden Siber

A. Manajemen Krisis Siber

B. Persiapan Manajemen Krisis Siber

C. Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber

(lanjutan di halaman 39)

[7] Bagian “Menimbang” dan Pasal 30, PerBSSN 1/2024, serta bagian “Menimbang” dan Pasal 25, PerBSSN 2/2024.

[8] Pasal 1 (4), Perpres 82/2022, Pasal 1 (1), Perpres 47/2023, Pasal 1 (3), PerBSSN 1/2024 dan Pasal 1 (1), PerBSSN 2/2024.

[9] Pasal 1 (9), PerBSSN 2/2024.

[10] Pasal 1 (5), Perpres 82/2022, Pasal 1 (3), Perpres 47/2023, Pasal 1 (4), PerBSSN 1/2024 dan Pasal 1 (2), PerBSSN 2/2024.

[11] Pasal 1 (4), Perpres 47/2023 dan Pasal 1 (3), PerBSSN 2/2024.

I. Manajemen Insiden Siber

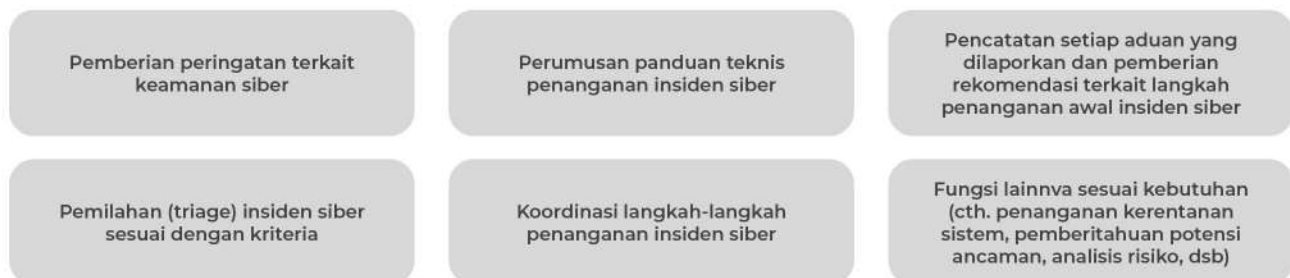
Perlu dicatat bahwa pemberlakuan PerBSSN 1/2024 menyebabkan pencabutan dan penggantian kerangka TTIS sebelumnya, yaitu Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber ("PerBSSN 10/2020").^[12] Sebagaimana judulnya, PerBSSN 1/2024 secara luas membahas empat aspek utama yang khususnya berkaitan dengan manajemen insiden siber. Empat aspek ini terbagi menjadi sebagai berikut:^[13]



A. TTIS

Sementara kebanyakan klasifikasi TTIS yang semula diatur dalam PerBSSN 10/2020 masih tetap ada dalam PerBSSN 1/2024 (yaitu TTIS nasional, sektoral, dan organisasi), PerBSSN 1/2024 kini menghapus kategori khusus TTIS (yaitu kategori yang dibuat untuk kebutuhan bersifat khusus).^[14] Dalam hal ini, PerBSSN 1/2024 mengklarifikasi bahwa selain PSE, penyelenggara IIV kini juga harus membentuk TTIS organisasi sendiri.^[15]

Kerangka baru PerBSSN 1/2024 kini juga memperjelas bahwa tiap tingkatan TTIS bertanggung jawab atas penanganan insiden siber melalui cara-cara tertentu (yaitu penanggulangan dan pemulihan, serta diseminasi informasi terkait insiden siber dan berbagai langkah-langkah pencegahan dan/atau pengurangan).^[16] Dalam hal ini, kerangka baru menetapkan bahwa TTIS tersebut harus memiliki enam fungsi sebagai berikut:^[17]



Selain itu, baik PerBSSN 10/2020 maupun PerBSSN 1/2024 mewajibkan TTIS sektoral dan organisasi (PSE IIV atau PSE non-IIV) untuk melakukan registrasi kepada TTIS nasional.^[18] Dalam hal ini, registrasi tersebut meliputi tiga tahapan, yang diilustrasikan dalam diagram alir berikut:^[19]



(lanjutan di halaman 40)

[12] Pasal 29, PerBSSN 1/2024.

[13] Pasal 2, PerBSSN 1/2024.

[14] Bandingkan Pasal 2 dan 9, PerBSSN 10/2020 dengan Pasal 4, PerBSSN 1/2024.

[15] Bandingkan Pasal 7, PerBSSN 10/2020 dengan Pasal 7 - 8, PerBSSN 1/2024.

[16] Pasal 3 (1 - 2), PerBSSN 1/2024.

[17] Pasal 3 (3), PerBSSN 1/2024.

[18] Bandingkan Pasal 16, PerBSSN 10/2020 dengan Pasal 9, PerBSSN 1/2024.

[19] Bandingkan Pasal 17, PerBSSN 10/2020 dengan Pasal 10, PerBSSN 1/2024.

Penting juga dicatat bahwa TTIS sektoral dan organisasi penyelenggara IIV harus dibentuk dalam enam bulan sejak PerBSSN 1/2024 diundangkan, yaitu 18 Juli 2024.^[20] Selain itu, TTIS tersebut juga harus dilakukan registrasi paling lambat sampai batas waktu pembentukan. Dalam hal ini, TTIS sektoral dan organisasi yang sebelumnya sudah diregistrasi berdasarkan PerBSSN 10/2020 wajib menyesuaikan dengan PerBSSN 1/2024 dan melengkapi segala persyaratan registrasi yang belum dipenuhi berdasarkan kerangka baru ini.^[21]

B. Pelaporan Insiden Siber

Pada intinya, insiden siber yang ditemui wajib dilaporkan oleh TTIS organisasi kepada TTIS sektoral dengan tembusan yang diberikan kepada TTIS nasional.^[22] Laporan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 24 jam setelah ditemukan adanya insiden siber pada IIV.^[23] Namun, jika tidak ada TTIS sektoral, temuan insiden siber wajib dilaporkan kepada Kementerian atau Lembaga ("K/L").^[24]

PerBSSN 1/2024 menyatakan bahwa laporan yang diuraikan di atas wajib memuat jenis informasi tertentu (yaitu informasi kontak pelapor serta deskripsi, kronologi, dan dampak insiden siber). Dalam hal ini, insiden yang dilaporkan harus ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut:^[25]

Hasil deteksi tiap TTIS

Analisis insiden siber berdasarkan
aduan dari pemilik sistem atau
masyarakat

Pemberian peringatan dari TTIS
nasional setelah insiden siber
terkonfirmasi

Perlu dicatat bahwa insiden siber yang dilaporkan merupakan insiden yang mempunyai klasifikasi insiden siber risiko tinggi dan yang berdasarkan hasil penerapan manajemen risiko pada organisasinya.^[26]

C. Pelaksanaan Kesiapan terhadap Insiden Siber

Kesiapan insiden siber harus dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan (yaitu penyelenggara IIV, PSE, K/L dan BSSN) melalui penyusunan rencana tanggap insiden siber (yaitu rencana persiapan penanganan berbagai jenis insiden siber yang mungkin terjadi) ("Rencana Tanggap") dan rencana keberlangsungan kegiatan (yaitu untuk memastikan keberlangsungan kegiatan siber) ("Rencana Keberlangsungan").^[27] Tabel berikut meringkas informasi yang harus tercantum di dua rencana tersebut:

Rencana Tanggap^[28]

Harus memuat paling sedikit informasi berikut:

1. Tahapan penanganan insiden siber;
2. Jenis insiden siber yang ditangani;
3. Daftar peran dan tanggung jawab anggota tim TTIS;
4. Daftar perangkat, teknologi, dan sumber daya yang diperlukan;
5. Daftar jaringan penting dan data pemulihan jaringan; dan
6. Daftar pihak internal dan eksternal yang perlu dihubungi.

Rencana Keberlangsungan^[29]

Harus memuat paling sedikit informasi berikut:

1. Daftar peran dan tanggung jawab anggota tim pelaksana Rencana Keberlangsungan kegiatan;
2. Strategi dan lini masa untuk pemulihan fungsi dan layanan bisnis sesuai kritikal/prioritas;
3. Daftar sumber daya utama, peralatan dan staf yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dan layanan bisnis sesuai kritikal/prioritas; dan
4. Tahapan dan lini masa untuk pemulihan penuh.

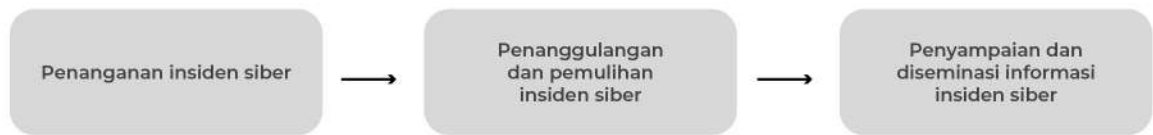
(lanjutan di halaman 41)

[20] Pasal 28, PerBSSN 1/2024.
[21] Pasal 27, PerBSSN 1/2024.
[22] Pasal 15 (1), PerBSSN 1/2024.
[23] Pasal 15 (5), PerBSSN 1/2024.
[24] Pasal 15 (6), PerBSSN 1/2024.

[25] Pasal 15 (2) dan (4), PerBSSN 1/2024.
[26] Pasal 15 (3) dan (7), PerBSSN 1/2024.
[27] Pasal 23 - 24, PerBSSN 1/2024.
[28] Pasal 24 (2), PerBSSN 1/2024.
[29] Pasal 25 (2), PerBSSN 1/2024.

D. Manajemen Insiden Siber

Secara keseluruhan, PerBSSN 1/2024 menyatakan bahwa manajemen insiden siber terdiri dari tiga tahapan berikut:



Pertama, PerBSSN 1/2024 mengkategorikan yurisdiksi umum TTIS terkait penanganan insiden siber berdasarkan karakteristik insidennya, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Pihak yang Terdampak Insiden Siber	Karakteristik Insiden Siber yang Ditemukan	Pelaksana Mitigasi Insiden Siber
Penyelenggara IIV ^[30]	Mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan sistem elektronik penyelenggara IIV	TTIS organisasi, yang dapat dibantu oleh TTIS sektoral dan/atau nasional, dalam hal diperlukan
PSE Non-IIV ^[31]	Mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan sistem elektronik	TTIS organisasi
	Selain mengganggu keberlangsungan layanan sistem elektronik, insiden siber yang ditemukan juga mengakibatkan gangguan pada pihak-pihak berikut: 1. Paling sedikit dua organisasi; atau 2. Lebih dari setengah jumlah organisasi dalam lingkup satu sektor.	TTIS sektoral
	Selain mengganggu keberlangsungan layanan sistem elektronik, insiden siber yang ditemukan juga mengakibatkan gangguan pada pihak-pihak berikut: 1. Paling sedikit dua sektor, dengan jumlah paling sedikit dua organisasi yang terdampak di setiap sektor; atau 2. Lebih dari setengah jumlah organisasi dalam lingkup satu sektor.	TTIS nasional

(lanjutan di halaman 42)

[30] Pasal 16, PerBSSN 1/2024.
[31] Pasal 17 (1 - 3), PerBSSN 1/2024.

Sementara rincian langkah penanggulangan dan pemulihan insiden siber tercantum secara komprehensif dalam Lampiran PerBSSN 1/2024, kerangka baru ini juga menyatakan bahwa kegiatan penanggulangan dan pemulihan insiden siber telah dibagi menjadi empat kategori yang meliputi kegiatan minimum tertentu. Empat kategori beserta kegiatan minimum yang diperlukan ini dirangkum dalam tabel-tabel berikut:^[32]

Penyusunan Rencana Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber ^[33]	
Penyusunan dan penetapan Rencana Tanggap, yang disetujui oleh pimpinan organisasi	Penyusunan dan penetapan Rencana Keberlangsungan, yang disetujui oleh pimpinan organisasi
Memastikan Rencana Tanggap dan Rencana Keberlangsungan dilaksanakan dan disimulasikan secara berkala	Memastikan semua personel yang mengelola IIV dan sistem elektronik non-IIV mengetahui prosedur penggunaan rekam cadang
Memastikan semua personel yang mengelola IIV dan sistem elektronik non-IIV mengetahui peran dan prosedur penanggulangan dan pemulihan sesuai Rencana Tanggap dan Rencana Keberlangsungan	
Analisis dan Pelaporan Insiden Siber ^[34]	
Pengumpulan informasi kondisi terkini dari IIV dan sistem elektronik non-IIV dari hasil deteksi internal dan sumber informasi eksternal	Identifikasi dan analisis potensi dampak dari insiden siber
Memastikan insiden siber dikategorikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan	Memastikan bahwa insiden siber dilaporkan kepada pihak terkait
Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber ^[35]	
Memastikan insiden siber diisolasi dan dimitigasi sesuai Rencana Tanggap	Mengumpulkan dan memelihara bukti insiden siber dari IIV dan sistem elektronik non-IIV
Menginvestigasi dan eradikasi penyebab insiden siber	Mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka eskalasi upaya penanggulangan insiden siber

(lanjutan di halaman 43)

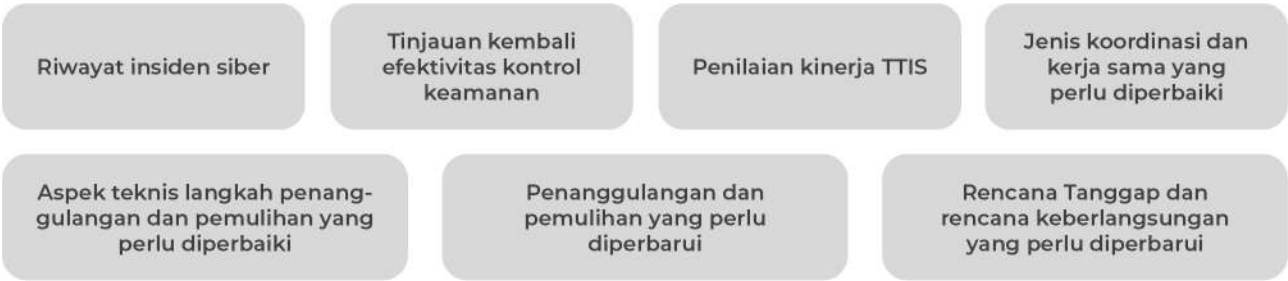
[32] Pasal 18 (1 - 2) dan Bag. A, Lampiran, PerBSSN 1/2024.
[33] Pasal 18 (3), PerBSSN 1/2024.
[34] Pasal 18 (4), PerBSSN 1/2024.
[35] Pasal 18 (6), PerBSSN 1/2024.

Melaksanakan prosedur pencadangan dan pemulihan sistem dan data sesuai Rencana Keberlangsungan	Menentukan dan menerapkan retensi hasil pencadangan yang tidak terpakai
Pengujian ulang terhadap fungsi vital dan fungsi pendukung untuk memastikan capaian pemulihan terpenuhi	Memastikan organisasi memiliki dan mengelola strategi komunikasi publik yang harus dilaksanakan saat dan setelah terjadinya insiden siber
Penyampaian informasi penanggulangan dan pemulihan insiden siber kepada pihak terkait	

Peningkatan Keamanan Setelah Insiden Siber^[36]

Peninjauan kembali efektivitas kontrol keamanan yang diterapkan	Riviu dan/atau pembaruan Rencana Tanggap and Rencana Keberlangsungan secara berkala
Mengumpulkan dan memelihara bukti hasil forensik digital	Meninjau efektivitas kinerja penanganan insiden yang dilakukan oleh TTIS secara berkala

Selain kegiatan-kegiatan yang diuraikan di atas, berbagai pemangku kepentingan yang ingin melakukan penyelesaian yang baik terhadap insiden siber dapat meningkatkan keamanan setelah insiden melalui penyelenggaraan kegiatan pembelajaran insiden siber yang dilakukan melalui proses riviu setelah terjadinya insiden. Hasil riviu setelah terjadinya insiden tersebut harus disampaikan kepada TTIS sektoral, dengan tembusan disampaikan kepada TTIS nasional.^[37] Dalam hal ini, riviu setelah terjadinya insiden tersebut harus mencakup diskusi dan diseminasi paling sedikit hal-hal berikut:^[38]



Sebagai tahap akhir manajemen insiden siber, PerBSSN 1/2024 memberi mandat bahwa TTIS harus menyampaikan informasi kepada pihak terdampak yang membahas berbagai jenis informasi terkait insiden siber. Informasi tersebut terbagi sebagai berikut:^[39]

(lanjutan di halaman 44)

[36] Pasal 18 (7), PerBSSN 1/2024.
[37] Pasal 19 (1 - 2) dan (4), PerBSSN 1/2024.
[38] Pasal 19 (3), PerBSSN 1/2024.
[39] Pasal 20, PerBSSN 1/2024.

Jenis indikasi insiden siber

Kode distribusi informasi

Sistem dan/atau aset terdampak

Rekomendasi mitigasi

Selain informasi yang diuraikan di atas, PerBSSN 1/2024 juga memberi mandat bahwa TTIS harus melakukan diseminasi berbagai jenis informasi dengan tujuan mencegah dan/atau mengurangi dampak insiden siber melalui penggunaan kode distribusi informasi.^[40] Kode distribusi ini tercantum secara komprehensif dalam Lampiran PerBSSN 1/2024 dan berupa Traffic Light Protocol (“TLP”) yang meliputi empat label untuk menunjukkan batas pembagian informasi sensitif, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:^[41]

Label TLP	Keterangan
TLP: RED	Untuk mata dan telinga penerima individu saja, tidak ada pengungkapan lebih lanjut
TLP: AMBER	Pengungkapan terbatas, penerima hanya dapat menyebarkan informasi di lingkup internal organisasi dan kliennya saja
TLP: GREEN	Pengungkapan terbatas, penerima hanya dapat menyebarkan informasi di lingkup internal komunitasnya saja
TLP: CLEAR	Penerima dapat menyebarkan informasi yang diterima tanpa batasan pengungkapan

Dalam hal TLP yang dirangkum di atas, PerBSSN 1/2024 menyatakan bahwa TLP dapat digunakan untuk diseminasi informasi melalui berbagai media sejalan dengan ketentuan berikut:^[42]

Data Sistem Olah Pesan	Dokumen	Pertukaran Informasi Otomatis
- Label TLP dan batasan tambahan lainnya mengenai olah pesan harus menunjukkan informasi yang dipertukarkan - Label TLP harus berada di baris subiek email - Jika diperlukan, bagian akhir teks yang akan diberi label harus ditandai	- Label TLP dalam dokumen harus ditunjukkan di header dan footer setiap halaman - Harus menggunakan huruf ukuran 12 poin atau lebih besar dan direkomendasikan dengan format rata kanan	Meskipun tidak ada batasan spesifik yang diatur, dan pertukaran kemudian diserahkan kepada perancang pertukaran informasi otomatis, penggunaan TLP harus sesuai dengan standar yang diatur dalam PerBSSN 1/2024

(lanjutan di halaman 45)

[40] Pasal 21, PerBSSN 1/2024.
[41] Bag. B, Lampiran, PerBSSN 1/2024.
[42] Ibid.

II. Manajemen Krisis Siber

Sebagai kerangka pelaksana Perpres 47/2023, PerBSSN 2/2024 menguraikan lebih lanjut dua aspek utama yang khususnya berkaitan dengan manajemen krisis siber. Aspek tersebut terbagi sebagai berikut:^[43]



A. Persiapan Manajemen Krisis Siber

Pada intinya, persiapan dasar manajemen krisis siber berkaitan erat dengan penyusunan rencana kontingensi krisis siber (“Rencana Kontingensi”), yang merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kepala BSSN dengan mengikutsertakan K/L, TTIS dan pemangku kepentingan lainnya. Rencana Kontingensi menjadi acuan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak krisis siber.^[44] Perlu dicatat bahwa Rencana Kontingensi tersebut harus ditetapkan paling lambat 12 bulan setelah PerBSSN 2/2024 ditetapkan, yaitu 10 Januari 2025.^[45]

Dalam hal ini, Rencana Kontingensi harus disusun berdasarkan faktor-faktor tertentu dan harus memuat informasi berikut:

Dasar Penyusunan ^[46]	Informasi Tertampil ^[47]
Meliputi: 1. Penilaian risiko keamanan siber nasional; 2. Agenda prioritas nasional; dan 3. Lanskap keamanan siber.	Memuat: ^[48] 1. Skenario ancaman; 2. Karakteristik dan riwayat ancaman siber; 3. Peran, tanggung jawab dan pola komunikasi; 4. Proses pemulihan; 5. Pembiayaan; dan 6. Pelaporan.

Selain itu, PerBSSN 2/2024 memberi mandat bahwa Rencana Kontingensi di atas harus diberikan simulasi yang bertujuan memastikan aktualitas, validitas dan kualitas. Dalam hal ini, simulasi tersebut harus dilaksanakan oleh BSSN secara berkala paling sedikit satu kali dalam dua tahun dan harus memuat kegiatan berikut:^[49]

Latihan	Pemeranan
Menguji prosedur Rencana Kontingensi bersifat teknis	Pengetahuan, pemahaman dan pengujian prosedur Rencana Kontingensi dalam pengambilan keputusan bersifat manajerial
• Latihan teknis sektor tertentu • Latihan teknis fungsi tertentu • Latihan teknis menyeluruh • Latihan teknis lainnya	• Seminar krisis siber • Lokakarya krisis siber • Pemeranan pengambilan keputusan (<i>tabletop exercises</i>) krisis siber

(lanjutan di halaman 46)

[43] Pasal 2, PerBSSN 2/2024.

[44] Pasal 4 (1) dan 5, PerBSSN 2/2024.

[45] Pasal 24, PerBSSN 2/2024.

[46] Pasal 4 (2), PerBSSN 2/2024.

[47] Pasal 4 (3), PerBSSN 2/2024.

[48] Pasal 4 (3), PerBSSN 2/2024.

[49] Pasal 6, PerBSSN 2/2024.

Perlu dicatat bahwa PerBSSN 2/2024 memberi mandat bahwa BSSN dan K/L harus mengevaluasi Rencana Kontingensi secara berkala sekali setahun atau jika dibutuhkan. Dalam hal ini, hasil evaluasi dapat menjadi dasar BSSN membuat perubahan.^[50]

B. Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber

Pada intinya, PerBSSN 2/2024 menegaskan bahwa manajemen krisis siber harus diselenggarakan dalam tiga tahapan berikut:^[51]



Tabel berikut menyoroti berbagai kegiatan yang termasuk dalam tahap sebelum krisis siber di atas, sebagaimana diuraikan dalam PerBSSN 2/2024:

Kegiatan Sebelum Krisis Siber	Keterangan
Tanggap insiden siber ^[52]	TTIS organisasi, sektoral, dan nasional merespons insiden siber yang terus meningkat dan berpotensi menjadi krisis siber secara bertahap sesuai dengan peraturan terkait insiden siber.
Peringatan dini krisis siber ^[53]	- Berdasarkan kriteria krisis siber yang ditetapkan, TTIS nasional akan melakukan penilaian potensi krisis siber sebelum melaporkan hasil penilaian kepada Kepala BSSN. - TTIS nasional akan menyampaikan peringatan kepada PSE mengenai eskalasi insiden siber yang mengarah menjadi krisis siber dalam berbagai bentuk (misalnya notifikasi, dokumen imbauan keamanan atau media lainnya). - PSE kemudian wajib menindaklanjuti peringatan tersebut dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada TTIS nasional secara berkala setiap dua jam atau jika diperlukan setelah peringatan dini diterima.
Penetapan status krisis siber ^[54]	Setelah penyampaian usulan oleh Kepala BSSN, presiden akan menetapkan status krisis siber dan membentuk gugus tugas krisis siber.

Sebagaimana diuraikan di atas, TTIS nasional bertanggung jawab atas penilaian potensi krisis siber berdasarkan insiden siber dan/atau peristiwa siber sebelum penyampaian peringatan dini. Penilaian tersebut harus memperhatikan kriteria krisis siber yang berlaku, sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BSSN, yang paling sedikit memuat potensi dampak berikut:^[55]

(lanjutan di halaman 47)

[50] Pasal 7, PerBSSN 2/2024.
[51] Pasal 8, PerBSSN 2/2024.
[52] Pasal 10 (1 - 3), PerBSSN 2/2024.
[53] Pasal 11 - 12, PerBSSN 2/2024.
[54] Pasal 13 (1 - 3), PerBSSN 2/2024.
[55] Pasal 12 (2), (4) dan (5), PerBSSN 2/2024.

Korban jiwa, hilang,
dan terluka

Kerugian finansial

Kondisi keamanan
dan ketertiban
umum

Kerusakan pada IIV

Selama tahap krisis siber, gugus tugas krisis siber harus mengacu pada Rencana Kontingensi yang diuraikan sebelumnya.^[56] Selain itu, manajemen saat terjadi krisis siber meliputi empat kegiatan utama, yang dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Kegiatan Saat Terjadi Krisis Siber	Keterangan
	Meliputi perhitungan:
Perhitungan perkiraan nilai kerusakan dan kerugian ^[62]	• Nilai aset yang rusak; • Kerugian ekonomi yang timbul akibat adanya aset rusak; dan • Penurunan tingkat reputasi.
Perhitungan perkiraan biaya pemulihan ^[63]	Meliputi perhitungan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan sistem elektronik seperti sebelum krisis siber
Perhitungan korban jiwa, hilang, dan terluka ^[64]	Meliputi penghitungan jumlah keseluruhan korban jiwa, hilang, dan terluka
Evaluasi upaya penanganan krisis siber ^[65]	Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan Rencana Kontingensi krisis siber dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan keamanan siber

Namun, perlu dicatat bahwa PerBSSN 2/2024 menyebutkan bahwa perkiraan kerusakan dan kerugian di atas harus dihitung sejalan dengan dasar tertentu, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Objek yang Dihitung	Dasar Perhitungan
Aset yang rusak ^[66]	Ketentuan manajemen aset yang berlaku di PSE terdampak atau melalui perbandingan nilai aset yang rusak dengan nilai aset sebelum terjadinya krisis siber
Kerugian ekonomi dari aset yang rusak ^[67]	Dampak ekonomi yang harusnya diperoleh ketika sistem elektronik berfungsi dengan baik
Penurunan tingkat reputasi ^[68]	Berdasarkan persepsi publik

(lanjutan di halaman 48)

[56] Pasal 12 (3), PerBSSN 2/2024.
[57] Pasal 15, PerBSSN 2/2024.
[58] Pasal 16, PerBSSN 2/2024.
[59] Pasal 17, PerBSSN 2/2024.
[60] Pasal 18, PerBSSN 2/2024.
[61] Pasal 19 (2), PerBSSN 2/2024.

[62] Pasal 20 (1), PerBSSN 2/2024.
[63] Pasal 21, PerBSSN 2/2024.
[64] Pasal 22, PerBSSN 2/2024.
[65] Pasal 23, PerBSSN 2/2024.
[66] Pasal 20 (2), PerBSSN 2/2024.
[67] Pasal 20 (3), PerBSSN 2/2024.

[68] Pasal 20 (4), PerBSSN 2/2024.

Kesimpulan

PerBSSN 1/2024 mewakili upaya signifikan dalam mengatasi lanskap ancaman siber yang terus meningkat melalui penyempurnaan kerangka hukum tentang manajemen insiden siber. Kerangka regulasi yang baru ini membahas berbagai hal krusial seperti TTIS, mekanisme pelaporan, penanganan insiden dan pelaksanaan kesiapan. Selain itu, tiga tahapan manajemen insiden siber, sebagaimana diuraikan oleh BSSN, menekankan pentingnya kesiapan dan harus disertai berbagai strategi pelaksanaan yang proaktif. Namun, perlu dicatat bahwa pencabutan kerangka sebelumnya yaitu PerBSSN 10/2020 menunjukkan bahwa TTIS organisasi dan sektoral harus memutakhirkan dokumen registrasi agar sejalan dengan pedoman baru yang diatur dalam PerBSSN 1/2024.

Secara bersamaan, komitmen pemerintah membangun sistem manajemen krisis siber yang efektif dapat dilihat kembali dari penerbitan Perpres 47/2023, yang tetap berlaku saat penulisan ini. Dalam hal ini, kerangka terbaru PerBSSN 2/2024 mengatur lebih lanjut persiapan dan pelaksanaan manajemen krisis siber, serta menyoroti pentingnya Rencana Kontingensi dan koordinasi antara PSE terdampak dengan BSSN. Selain menggambarkan tiga tahapan kegiatan manajemen, kerangka baru ini juga memperkenalkan sejumlah metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan kerusakan dan kerugian akibat serangan.



Sekilas Tentang Kadin for Naker

Kadin for Naker hadir dalam bentuk **platform digital** untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri sekaligus menjadi platform link & match antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Kadin for Naker merupakan **program pengembangan kapasitas** inisiatif Kadin Indonesia bersama dengan Serikat Buruh di Indonesia dan didukung oleh Pijar Foundation.

Manfaat Kadin for Naker untuk Pekerja

-  Materi pembelajaran yang dapat diakses **kapan saja**
-  Materi yang disesuaikan dengan **kebutuhan industri**
-  Lowongan kerja dari perusahaan yang **terverifikasi**

Manfaat Kadin for Naker untuk Perusahaan

-  Sarana **peningkatan kualitas SDM** bagi perusahaan
-  **Keterampilan pekerja** yang terverifikasi
-  Peningkatan kapasitas pekerja untuk kinerja yang **lebih optimal**
-  Pencarian tenaga kerja berdasarkan **kompetensi** yang dicari

Tata Cara Mendaftar

Kadin for Naker

Kategori Kelas di Kadin for Naker

Mencari Pekerjaan

Pengembangan Diri

Mencari Pendapatan Tambahan

Program Komputer

Bahasa

Keterampilan Industri Spesifik



WIKI WIRAUSAHA

Platform digital yang berfungsi sebagai wadah bagi UMKM, Perusahaan, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung UMKM Indonesia untuk naik kelas

Akses pasar

Akses keuangan

Pelatihan

Kemitraan inklusif

Direktori UMKM



Banyak sekali ilmu dan skill yang saya dapatkan setelah mengikuti program ini. Materinya mudah untuk dipahami, sehingga ilmunya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari bahkan di bisnis yang saya geluti selama ini.

Achmad Muzamil

Pengusaha asal Wonosobo

Mari bergabung dan tampilkan profil perusahaan anda agar terhubung dengan berbagai calon Mitra Perusahaan atau UMKM lainnya.

Daftar ke:

wikiwirausaha@kadin.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29

Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950



wikiwirausaha.id

“Menuju Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan”

NZH adalah sebuah inisiatif dari dunia usaha untuk mencapai *Net Zero Emission* di Indonesia. Bersama Kadin, mari wujudkan komitmen perusahaan anda menuju *Net Zero*, melalui:

Science Based Emission

Emission Reduction

Climate Mitigation

Climate Adaptation

Daftar sekarang juga ke

secretariat@netzerohub.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950



Netzerohub.id

EKSPOR BARANG ANDA KE SELURUH DUNIA MELALUI TRADE

TRADE adalah platform Sentra Layanan Dokumen Elektronik KADIN Indonesia yang membantu pembuatan dokumen ekspor seperti *COO*, *Certificate of Export Goods*, *Certificate of Free Sale*, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

Tahapan-tahapan untuk membuat dokumen ekspor:



Klik **Masuk** atau **Daftar** untuk masuk maupun mendaftar akun.

Masukkan alamat email dan password. Jika belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dengan klik **Daftar**.



Pilih **Document Registration** untuk melengkapi data-data mengenai perusahaan.



Lengkapi data-data dan unggah dokumennya, lalu klik **Save Changes**.



Pilih **Create COO** lalu pilih form yang sesuai kebutuhan dengan klik **Create**



Isi form dengan melengkapi data Itinerary dan Goods Item dan unggah dokumennya.



Setelah selesai mengisi form, tunggu beberapa saat hingga status berubah dari **Waiting for Approval** menjadi **Waiting for Payment**. Lalu buka menu **Transaction**, pilih **Pending Transaction**, lalu klik **Pay**. Kemudian lakukan pembayarannya menggunakan **virtual account** yang tertera.



Setelah pembayaran dilunaskan, COO **Siap Dicetak** dan digunakan.

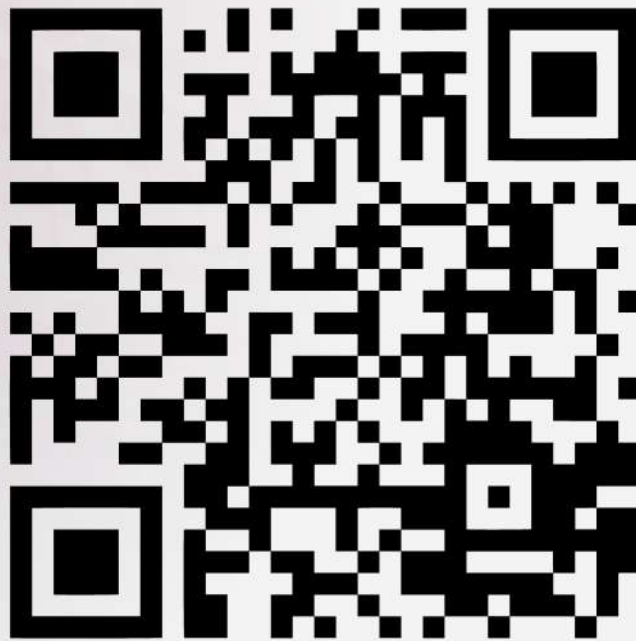
Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi Help desk:

☎ +62 882-1975-0620 (LEO) ☎ +62 882-9208-4913 (ALDI)





Mari menjadi bagian dari **ekosistem bisnis Indonesia** dengan bergabung Kadin Indonesia



tinyurl.com/pendaftarananggotakadin



Program-Program Kadin Indonesia Telah
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jadilah Bagian Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sebagai **Sponsor Kadin Indonesia**



Kegiatan Utama Kadin Indonesia 2024



**Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia**
17 Agustus



**Hari Ulang Tahun
Kadin Indonesia**
24 September



**Rapimnas
Kadin Indonesia**
Q4 2024



**Kadin Impact Award
Sepanjang Tahun**
2024



**Quarterly Regulatory
Outlook 2024**



**Quarterly Policy
Outlook 2024**

Informasi lanjutan tentang kerja sama dan
kolaborasi dapat menghubungi

Andri (+62 8560 306 7593)

Terbangkan Potensi Ekonomi Bersama, Mencapai Visi Indonesia Emas 2045!



Kadin Indonesia dan Garuda Indonesia berkolaborasi untuk memberikan **kemudahan** dan **kenyamanan** bagi seluruh anggota Kadin Indonesia, dalam melakukan **perjalanan udara** di dalam maupun luar negeri

Manfaat yang dapat diperoleh Anggota Kadin Indonesia

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Internasional

POTONGAN HARGA

3%

Rute Domestik

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Middle East

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Interline

Kemudahan lain yang dapat dimiliki Anggota Kadin Indonesia



Memiliki ekstra bagasi
hingga **5 kilogram**



Mendapatkan kemudahan
program MICE jika bepergian
dalam kapasitas 100 orang



Memiliki **akses check-in**
pada **counter khusus**



Mendapatkan **staf sales khusus**



Segera daftarkan dirimu menjadi
Anggota Kadin Indonesia dan nikmati
manfaat untuk melakukan perjalanan bersama

Garuda Indonesia

Nikmati Benefit Eksklusif sebagai Anggota Kadin Indonesia bersama Hyundai!

Optimalkan mobilitas bisnis Anda dengan **potongan** harga istimewa dari Kadin Indonesia x Hyundai hingga **50 juta rupiah***



IONIQ 5



IONIQ 6

Mobil Listrik



Santa Fe



Stargazer



Creta



Palisade



Staria

Mobil Non-Listrik

Tata cara pembelian:

1. Hubungi nomor Kadin Indonesia yang tertera untuk melakukan verifikasi anggota aktif Kadin Indonesia yang telah memiliki KTA-B
2. Setelah melakukan verifikasi, pihak Hyundai Indonesia akan segera menghubungi Anda untuk melanjutkan proses transaksi

* Potongan harga berbeda-beda untuk masing-masing jenis mobil

Informasi lebih lanjut hubungi:

+62 813-8801-2200
(Kadin Indonesia)



KADIN INDONESIA



Informasi lanjutan terkait **pasar internasional** dapat ditemukan di sini:

bsd-kadin.id

WIKI WIRUSAHA



Temukan informasi menarik bagi **pengembangan bisnis UMKM** di sini:

Wikiwirusaha.id



Temukan layanan **pengurusan dokumen dagang** di sini:

trade.kadin.id



Ikut bergabung dalam ekosistem **bisnis berkelanjutan** di sini:

Netzerohub.id



Kembangkan kapasitas dan kesempatan meningkatkan jenjang karir di sini:

kadinfornaker.id

Disusun oleh
Humas Sekretariat Kadin Indonesia

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484



kadin.indonesia.official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



www.kadin.id